

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Rezanofriyani**

**07011181520046**

**Konsentrasi : Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Rezanofriyani**

**07011181520046**

**Konsentrasi : Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN  
ILIR**

**Usulan Penelitian**

**Oleh :**

**REZANOFRIYANI  
07011181520046**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,    Februari 2019**

**Pembimbing I**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 19651117 199003 1004**



**Pembimbing II**

**Dra. Tuty Khirunnisyah, M.A  
NIP. 19620105 198803 2004**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 20 Juni 2019.

Indralaya, 20 Juni 2019

Ketua

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004



.....

Anggota

1. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004



.....

2. Ermanovida, S.Sos, M.Si  
NIP. 196911191998032001



.....

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MP  
NIP. 198108272009121002



.....

Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-nisaa' : 58)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Munadi dan Ibunda Nely Mulyana
- ✓ Adik-adikku Marta Aditama dan Chiko Alvendra
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk. Kebijakan kartu identitas anak merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Kebijakan kartu identitas anak ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Unit analisis yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Data diperoleh dari data primer yaitu wawancara kepada *keys informant* dan data sekunder melalui dokumentasi atau peraturan yang terkait dengan kebijakan kartu identitas anak. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan van Horn. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir belum tercapainya kinerja implementasi. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya yang menunjang pelaksanaan kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya dana, serta kurangnya kejelasan cara komunikasi antar instansi terkait. Dengan melihat hasil yang di dapat maka saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan kebijakan yaitu dari sumber-sumber kebijakan perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya penambahan jumlah anggaran dari jumlah sebelumnya, serta perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas antar instansi terkait agar terciptanya pola hubungan yang terarah.

**Kata Kunci: Kinerja, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Kartu Identitas Anak**

**Pembimbing I**



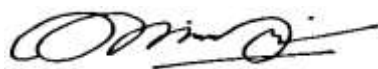
**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
**NIP. 19651117 199003 1004**

**Pembimbing II**



**Dra. Tuty Khairunnisyah, MA**  
**NIP. 19620105 198803 2004**

**Indralaya, Agustus 2019**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA**  
**NIP. 19810827 200912 1002**

## **ABSTRACT**

*This research is backed by the government's desire to protect and enrich the community and monitor the population. The policy of a child's identity card is a policy published as a form of government obligation to provide the resident's identity to all its citizens that are nationally applicable in order to encourage the improvement of data collection, protection, and public services, it is necessary to do the identity of the residence, especially to the child. This child identity card policy is stipulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016 on children's ID card. The purpose of this research is to know the factors that affect the performance of the policy implementation of child identity card conducted by the population service and civil registration of Ogan Ilir Regency. This research uses qualitative descriptive methods. The analysis Unit is the Department of Population and Civil registration of Ogan Ilir Regency. Data obtained from primary data are interviews to informant keys and secondary data through documentation or regulations related to the child's identity card policy. The study used the theory of Van Meter and van Horn. Based on the results of analysis and research field can be concluded that the performance of the policy implementation of children's identity card in the population office and the Civil registration of Ogan Ilir Regency has not achieved implementation performance. This is due to lack of resources that support the implementation of policies, both human resources and fund resources, as well as the lack of clarity of communication between related agencies. By looking at the results that can then the advice that the author can give to the implementation of the policy is that the sources of policy need to increase the number of human resources in this case the employees of the population and civil registration services, need There is an increase in the budget amount of the previous number, as well as the need for clear communication and coordination between the relevant agencies in order to create a directional relationship pattern.*

**Keywords: Performance, Policy Implementation, Child Identity Card Policy**

**Supervisor I**



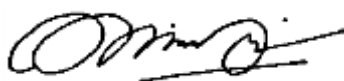
**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
**NIP. 19651117 199003 1004**

**Supervisor II**



**Dra. Tuty Khairunnisyah, MA**  
**NIP. 19620105 198803 2004**

**Indralaya, August 2019**  
**The Chairman of the Department of Publik Administration**  
**Faculty of Social and Political Sciences**  
**University of Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA**  
**NIP. 19810827 200912 1002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat Sarjana Ilmu Politik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah kebersamai, antara lain :

1. Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan disetiap saat baik itu doa, moril, maupun finansial selama dalam penyusunan skripsi ini, mereka yang selalu penuh dengan pengorbanan dan harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA selaku dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi memberikan masukan yang baik dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
9. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan arahan demi memberikan masukan yang baik dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
10. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Segenap Karyawan FISIP Unsri yang selama ini telah memberikan bantuan dalam kelengkapan akademik dalam proses perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2015, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Indralaya,      Juni 2019

Rezanofriyani  
NIM. 07011181520046

## DAFTAR ISI

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                   | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....      | iii  |
| LEMBAR PERSEMBAHAN .....                   | iv   |
| ABSTRAK .....                              | v    |
| ABSTRACT .....                             | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                       | vii  |
| DAFTAR ISI .....                           | ix   |
| DAFTAR TABEL .....                         | xi   |
| DAFTAR GAMBAR.....                         | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN.....                      | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |      |
| A. Latar Belakang .....                    | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 5    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>             |      |
| A. Landasan Teori.....                     | 7    |
| B. Teori-teori Implementasi .....          | 13   |
| C. Kartu Identitas Anak .....              | 18   |
| D. Model Implementasi yang digunakan ..... | 20   |
| E. Penelitian Terdahulu .....              | 21   |
| F. Kerangka Pemikiran .....                | 23   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>           |      |
| A. Pendekatan Penelitian .....             | 28   |
| B. Defini Konsep .....                     | 28   |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C. Fokus Penelitian .....        | 30 |
| D. Unit Analisis Data .....      | 31 |
| E. Data dan Sumber Data .....    | 31 |
| F. Keys Informant .....          | 32 |
| G. Teknik Pengumpulan Data ..... | 32 |
| H. Teknik Analisis Data .....    | 33 |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                         | 34 |
| 1. Gambaran Singkat Kabupaten Ogan Ilir .....                    | 34 |
| 2. Keadaan Geografis .....                                       | 36 |
| 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                 | 37 |
| B. Hasil dan Pembahasan .....                                    | 56 |
| 1. Standar dan Tujuan Kebijakan .....                            | 56 |
| 2. Sumber Daya .....                                             | 60 |
| 3. Karakteristik Agen Pelaksana .....                            | 66 |
| 4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Para Pelaksana ..... | 73 |
| 5. Disposisi (Sikap Para Pelaksana) .....                        | 76 |
| 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik .....                  | 80 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 85 |
| B. Saran .....      | 86 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>87</b> |
|-----------------------------|-----------|

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Jumlah anak usian 0-16 tahun dan kepemilikan KIA<br>Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 .....                                                         | 4       |
| 2. Penelitian terdahulu .....                                                                                                                       | 22      |
| 3. Fokus Penelitian .....                                                                                                                           | 30      |
| 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 .....     | 61      |
| 5. jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil Kab. Ogan Ilir, Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun 2018 ..... | 62      |
| 6. Kondisi Fasilitas Sarana Prasarana pada Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 .....                          | 65      |
| 7. Pemberian Materi atau Pelatihan Pelaksanaan Kartu Identitas Anak<br>Penduduk di Kabupaten ogan Ilir .....                                        | 78      |
| 8. Jumlah anak usian 0-16 tahun dan kepemilikan KIA<br>Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 .....                                                         | 79      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                                                           | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan .....                                                                                                         | 11      |
| 2. Tahapan Implementasi Kebijakan.....                                                                                                           | 12      |
| 3. Model Pendekatan The Policy Implementation Process.....                                                                                       | 15      |
| 4. Model Pendekatan The Policy Implementation Process .....                                                                                      | 16      |
| 5. Skema Kerangka Penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak<br>di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Ilir ..... | 27      |
| 6. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir .....                                                                   | 38      |
| 7. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir .....                                                                   | 67      |
| 8. Struktur Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak .....                                                                                        | 69      |
| 9. Dokumentasi kerjasama TKIT Menara Fitra dengan Dinas<br>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir .....                                     | 74      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Surat Tugas Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016
8. SOP Kartu Identitas Anak
9. Data Jumlah Penduduk usia 0-16 Tahun
10. Data Jumlah Anak yang Memiliki KIA

## DAFTAR SINGKATAN

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| KTP         | : Kartu Tanda Penduduk                    |
| NIK         | : Nomor Induk Kependudukan                |
| KIA         | : Kartu Identitas Anak                    |
| DISDUKCAPIL | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| KESBANGPOL  | : Kesatuan Bangsa dan Politik             |
| No          | : Nomor                                   |
| FISIP       | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   |
| UNSRI       | : Universitas Sriwijaya                   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk mengelola jumlah penduduk yang besar tersebut Indonesia harus memiliki sistem kependudukan yang baik dan pelayanan kepada masyarakat pun harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem administrasi kependudukan masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kaitan yang jelas satu dengan yang lainnya.

Beberapa peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah diterbitkan Pemerintah untuk mendata dan memantau penduduk seperti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan terkhusus dalam hal ini adalah KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dibuat pemerintah, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA, seperti tanda pengenal / bukti diri, persyaratan pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di perbankan, pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.

Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak pada Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan

pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak juga berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja. KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 1 ayat (7) Tahun 2016 tentang kartu identitas anak bahwa kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu KK asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Peraturan tersebut 3 berlaku mulai 19 Januari 2016. Pembuatan KIA ini gratis. Namun, pemerintah telah mengalokasikan dana di

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar menyediakan anggaran 8,79 miliar rupiah.

Berikut daftar jumlah anak usia 0-17 tahun dan kepemilikan KIA di Kabupaten Ogan Ilir.

**Tabel 1 Laporan Anak Usia 0-16 Tahun dan Kepemilikan KIA Kabupaten Ogan Ilir tanggal 01/01/2018 s.d 31/03/2019**

| No            | Kecamatan         | Jumlah Anak Usia 0-16 Tahun<br>( Berdasarkan Jenis Kelamin ) |              |               | Kepemilikan KIA |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|               |                   | Laki – laki                                                  | Perempuan    | Jumlah        |                 |
| 1.            | Muara Kuang       | 3227                                                         | 2970         | 6197          | 18              |
| 2.            | Tanjung Batu      | 7412                                                         | 6908         | 14320         | 188             |
| 3.            | Tanjung Raja      | 6527                                                         | 6158         | 12685         | 306             |
| 4.            | Indralaya         | 6018                                                         | 5733         | 11751         | 1035            |
| 5.            | Pemulutan         | 7389                                                         | 6963         | 14352         | 59              |
| 6.            | Rantau Alai       | 1616                                                         | 1467         | 3083          | 23              |
| 7.            | Indralaya Utara   | 5810                                                         | 5593         | 11403         | 226             |
| 8.            | Indralaya Selatan | 3319                                                         | 3064         | 6383          | 217             |
| 9.            | Pemulutan Selatan | 2509                                                         | 2438         | 4947          | 127             |
| 10.           | Pemulutan Barat   | 1967                                                         | 1807         | 3774          | 17              |
| 11.           | Rantau Panjang    | 2453                                                         | 2353         | 4806          | 16              |
| 12.           | Sungai Pinang     | 4036                                                         | 3599         | 7635          | 21              |
| 13.           | Kandis            | 1701                                                         | 1521         | 3222          | 24              |
| 14.           | Rambang Kuang     | 3646                                                         | 3357         | 7003          | 23              |
| 15.           | Lubuk Keliat      | 2870                                                         | 2546         | 5416          | 13              |
| 16.           | Payaraman         | 4531                                                         | 4099         | 8630          | 23              |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>65031</b>                                                 | <b>60576</b> | <b>125607</b> | <b>2336</b>     |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Maret 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat 125.607 jumlah anak usia 0-16 Tahun hanya 2336 anak yang memiliki Kartu Identitas Anak. KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan memiliki kartu pelajar bagi yang bersekolah. Namun, terdapat permasalahan yang menarik jika dilihat dari tabel 1 bahwa dari 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir hanya 1,8% dari jumlah penduduk usia 0-16 tahun. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai Kebijakan Kartu Identitas Anak. Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat kendala dalam pelaksanaan

kebijakan ini diantaranya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak ini tidak terlalu penting dikarenakan tanpa mempunyai Kartu identitas Anak, anak sudah mempunyai identitas sendiri di akta kelahiran maupun kartu keluarga, selain itu juga dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mempunyai jadwal tersendiri untuk mensosialisasikan kebijakan KIA ini di kalangan masyarakat.

Banyaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Agus, Erwan dan Ratih. 2015. *Implementasi kebijakan Publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*: Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*: Gramedia. Jakarta
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Suharto,Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*: Alfabeta: Bandung
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*: Prenadamedia Group. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*:CAPS. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*:CAPS. Yogyakarta.

### SUMBER PERATURAN:

- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

**SUMBER JURNAL:**

- Dwi, Windi. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.*
- Erziza, Aulia 2017. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang.*
- Fradika, Eri. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.*

**SUMBER SKRIPSI:**

- Afrizal, Chandy 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung.* Lampung: Fakultas Hukum
- Dina, Sukma 2018. *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak.* Yogyakarta: Fakultas Hukum
- Fradika, Eri 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**RUJUKAN DARI INTERNET:**

- <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/29/mengenal-fungsi-dan-manfaat-kartu-identitas-anak>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018
- <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ktp-anak-syarat-dan-cara-mengurusnya>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018
- <http://wartaterkini.news/tag/kartu-identitas-anak/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018
- <https://www.orami.co.id/magazine/ini-tata-cara-membuat-kartu-identitas-anak-kia-untuk-si-kecil/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018
- <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>, diakses pada tanggal 21 april 2019
- <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, diakses pada tanggal 21 april 2019